

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS Press. 2006.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis Bandung*: Alfabeta. 2001.
- Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2. 2010
- A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali. 2006.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah di Daerah*, Bandung; Sinar Baru. 1992.
- Kasum Djajasumarga, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1992.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- M. Islamy, M. Irfan, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Jakarta: Karonika. 1988.
- Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mohamad Ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Bina Aksara. 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2016
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa. 2009.
- Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat, CV Pustaka Setia, 2012.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* Jakarta: Djambatan. 1995.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2008.
- Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan. 2017.

- Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- W.J.S. Poerwadiminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205
- Indonesia. *Peraturan Gubernur DKI Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 52119
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62183
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5107
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14

**Online (Internet) :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, Hukum Online, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 20:00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung> Hukum Online, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 20:30 WIB

<https://economy.okezone.com/read/2012/11/10/320/716485/sosialisasi-perda-nomor-5-2012-tentang-parkir-di-jakarta>, di akses pada tanggal 25 September 2018

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis> Hukum Online, diakses tanggal 1 agustus 2018, pukul 16:36 WIB

<https://id.scribd.com> diakses pada tanggal 8 agustus 2018, pukul 16:40 WIB

<https://kbbi.web.id/tugas.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/ darling (dalam jaringan), diakses tanggal 29 mei 2018, jam 15:15 WIB.

<http://pemerintah.net/pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk/> Administrasi Pemerintah, diakses pada tanggal 29 mei 2018, jam 16:29 WIB.

<https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/ringkasan-dari-peraturan-daerah-dki-jakarta-nomor-8-tahun-2007-tentang-ketertiban-umum/>. Theresia Pasaribu, diakses pada tanggal 3 april 2018, Jam 15.44 WIB

**Wawancara**

Andi Kusnadi, Bidang Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat, wawancara dengan penulis, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, 18 Februari 2019

Rohidi, petugas parkir, wawancara dengan penulis, Puri Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. 5 Desember 2018

Iskandar, masyarakat, wawancara dengan penulis, Puri Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. 5 Desember 2018

Ilham Mukim, Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara dengan penulis,, Kantor Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 12 November 2018.